



**WALIKOTA BANDA ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 19 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
DAN NON STRUKTURAL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAITUL MAL  
KOTA KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh maka dipandang perlu mengatur Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Nonstruktural di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 5 Seri D Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH.**

#### **B A B I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat BMK adalah Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh;

6. Kepala .....

6. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam rangka memimpin suatu satuan kerja perangkat daerah.
8. Jabatan Nonstruktural adalah Jabatan yang tidak melaksanakan fungsi manajemen.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Rincian Tugas adalah bentangan atau paparan yang merupakan tugas jabatan dan merupakan upaya pokok yang harus dilakukan.

## **BAB II RINCIAN TUGAS**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Nonstruktural di lingkungan Sekretariat BMK.

### **Pasal 3**

Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rincian Tugas Jabatan Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat BMK.

### **Pasal 4**

Kedudukan Jabatan Struktural dan Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung sesuai dengan jenjang jabatan

### **Pasal 5**

Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III.....

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Mei 2011 M  
6 J. Akhir 1432 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
pada tanggal 10 Mei 2011 M  
6 J. Akhir 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN, T.A**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 19**